



LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2023

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah laporan pertanggungjawaban kinerja bagi setiap SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar.

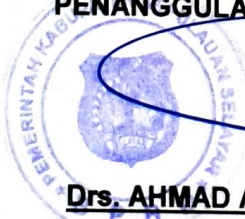
LPPD ini disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan LPPD sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun anggaran 2023.

Dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami hingga tersusunnya (LPPD) Tahun 2023, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan datang. Namun kami menyadari dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan LPPD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 19 Februari 2024

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**



Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

NIP. 19700726 199101 1 002

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum OPD	1
B. Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi OPD	3
C. Jumlah aparatur Sipil negara, Kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural	16
BAB II : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
2.1. capaian kinerja Penyelenggara Urusan pemerintahan	22
2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	24
BAB III : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	33
BAB IV : PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar berimplikasi pada kemunculan potensi kerawanan terhadap bencana yang tinggi, selain itu seiring dengan berjalannya waktu dan munculnya globalisasi yang telah mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai luhur budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat berkontribusi terhadap munculnya potensi konflik sosial (bencana non alam).

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang, gelombang laut ekstrim), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak), serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir dan pencemaran bahan kimia), bencana akibat ulah manusia lebih disebabkan karena konflik antar manusia (konflik sosial).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas-luasnya bagi keterlibatan inklusi masyarakat sebagai penerima manfaat. Pergeseran tersebut

bergerak mengikuti laju semangan kesetaraan gender, non partisan yang berkeadilan. Usaha untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut menjadi sebuah harapan pengurangan risiko bencana dan atau peningkatan kapasitas ketahanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menghadapi bencana.

Arah kebijakan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan secara terpadu antara upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak, sehingga mampu mensinergikan upaya pengurangan risiko bencana hingga menembus ke lapisan-lapisan masyarakat. Dengan demikian menjadi harapan kita semua bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, dengan sasaran yang jelas dan indikator yang terukur (kuantitatif/kualitatif). Untuk itulah Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar ini dirumuskan, sehingga kebijakan, strategi, program dan kegiatan dikonstruksikan atas tujuan, sasaran dan indikator yang realistis sebagai komitmen dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Selayar dalam sektor penanggulangan bencana 5 (lima) tahun mendatang.

Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) beralamat di Jln. Muh. Karaeng Bonto No. 30 Benteng Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (92812), dengan titik Koordinat (-6.116118,120.464084). Email :bpbd.kepulauanselayarkab.gmail.com

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 142 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dan sekaligus mempunyai fungsi pengordinasian, pengkomandoan dan pelaksana dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Pelaksana Badan
- 2) Sekretariat, meliputi :
 - a. Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - c. Subbagian Keuangan
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana Badan

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Pelaksana Badan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Badan meliputi :

- ✚ Menyusun rencana kerja Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Badan;
- ✚ Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- ✚ Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ✚ Menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ✚ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ✚ Menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- ✚ Menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- ✚ Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✚ Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana Badan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan

administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana;
- b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan badan penanggulangan bencana daerah;
- f. Pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja badan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Subbagian Umum, Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan,

kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

- Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja.
- Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Uraian tugas Sekretaris meliputi :

- ✚ Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✚ Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran badan penanggulangan bencana daerah;

- ✦ Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- ✦ Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- ✦ Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;
- ✦ Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✦ melaksanakan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- ✦ melaksanakan penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- ✦ mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Badan;
- ✦ melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- ✦ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✦ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✦ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ✚ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan ke siapsiagaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi, dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ merumuskan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
- ✚ melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- ✚ melaksanakan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik Dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik.

Uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

- ✚ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana daerah;
- ✚ melaksanakan tanggap kedaruratan dan logistik;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala bidang kedaruratan dan logistik dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- ✚ melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

- ✦ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✦ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✦ menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✦ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

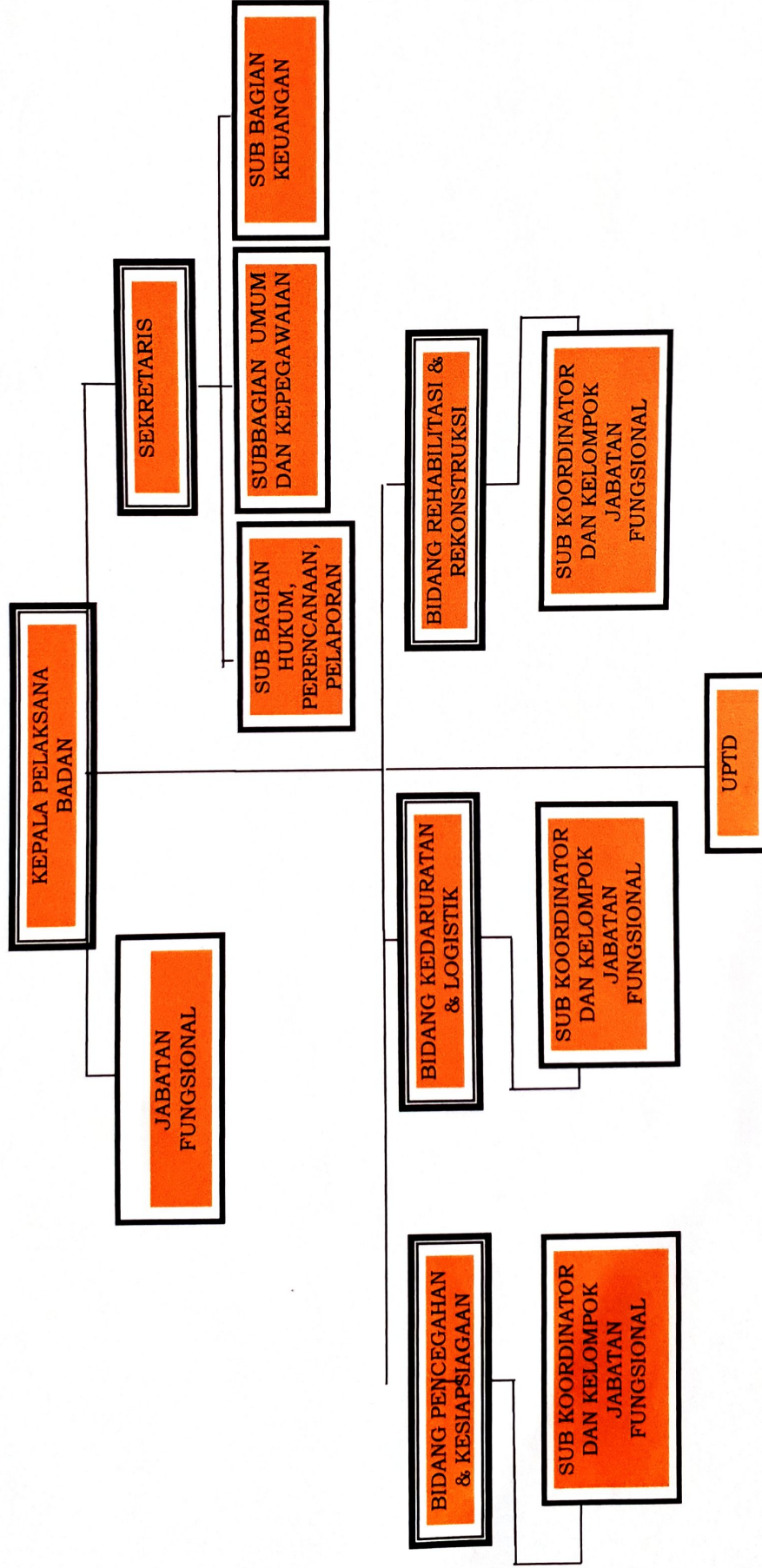
6) Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing masing.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



1.2. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam upaya untuk mencapai tujuan dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi antara lain :

1. Jumlah ketersediaan SDM (ASN dan PHL) BPBD Kab.Kep. Selayar

Tabel 1.2.1. Potensi Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Pangkat / Gol.	Jumlah	Pendidikan	Keterangan
1.	Pembina Utama Madya	1 Orang	S2	Kepala Pelaksana
2.	Pembina Tk. I	1 Orang	S2	Sekretaris,
3.	Pembina	1 Orang	S1	Kabid. RR
4.	Penata TK. I	3 Orang	S1/S2	Kasubag./ Fungsional Pelaksana
5.	Penata	5 Orang	S1/S2	Kepala Bidang/Kasubag./ Fungsional tertentu
6.	Penata Muda	3 Orang	S 1	Fungsional Pelaksana
7.	Pengatur Tk I	2 Orang	SMA	Fungsional Pelaksana
8.	Pengatur	1 Orang	SMA	Fungsional Pelaksana
9.	-	78 Orang	S1, DII dan SMA	Pegawai Harian Lepas
Jumlah		95 orang		

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2023.

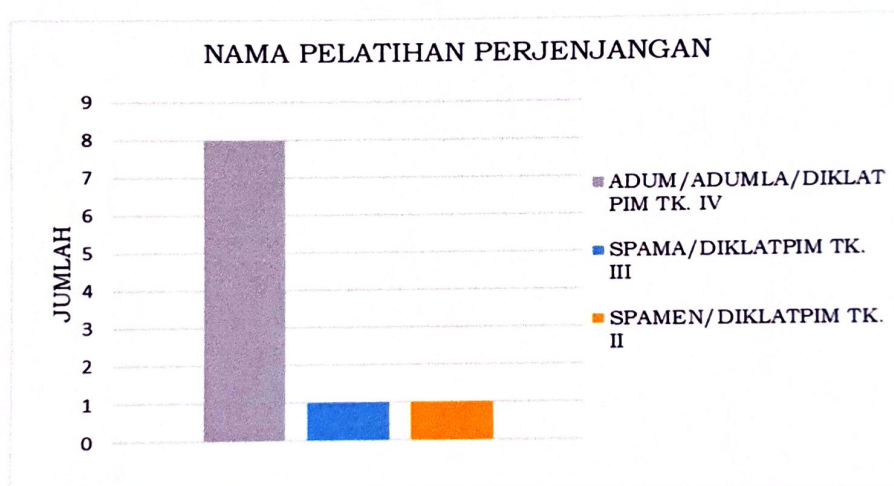
Tabel di atas, menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya aparatur belum cukup memadai dengan total pegawai sebanyak 95 orang, melihat kenyataan yang ada di lapangan masih membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan / skill yang secara teknis mampu menyikapi persoalan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinilai semakin kompleks.

2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 1.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV	8 Orang
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	1 Orang
3	SPAMEN/DIKLATPIM TK. II	1 Orang
JUMLAH		10 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2023.



Tabel di atas, menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan masih 10 orang atau sekitar 63 % dari total pejabat lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	3 Orang
2	III	11 Orang
3	II	3 Orang
4	I	0 Orang
5	PHL	78 Orang
Jumlah		95 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2023.



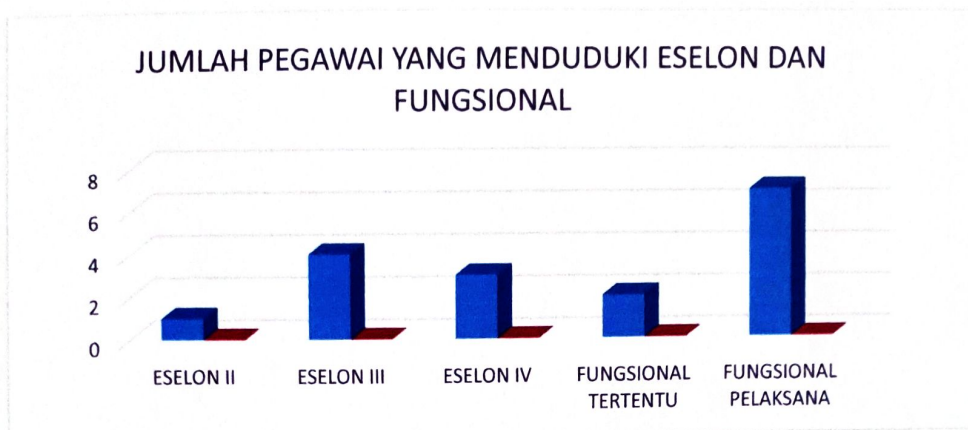
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 8 jabatan struktural dengan golongan ruang IV dan III, dan golongan ruang II terdapat 3 orang ASN, dan Pekerja Harian Lepas sebanyak 78 orang dengan total ASN dan PHL sebanyak 95 orang pada lingkup BPBD Kab.Kep. Selayar.

4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Fungsional

Tabel 1.2.4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon Dan Fungsional

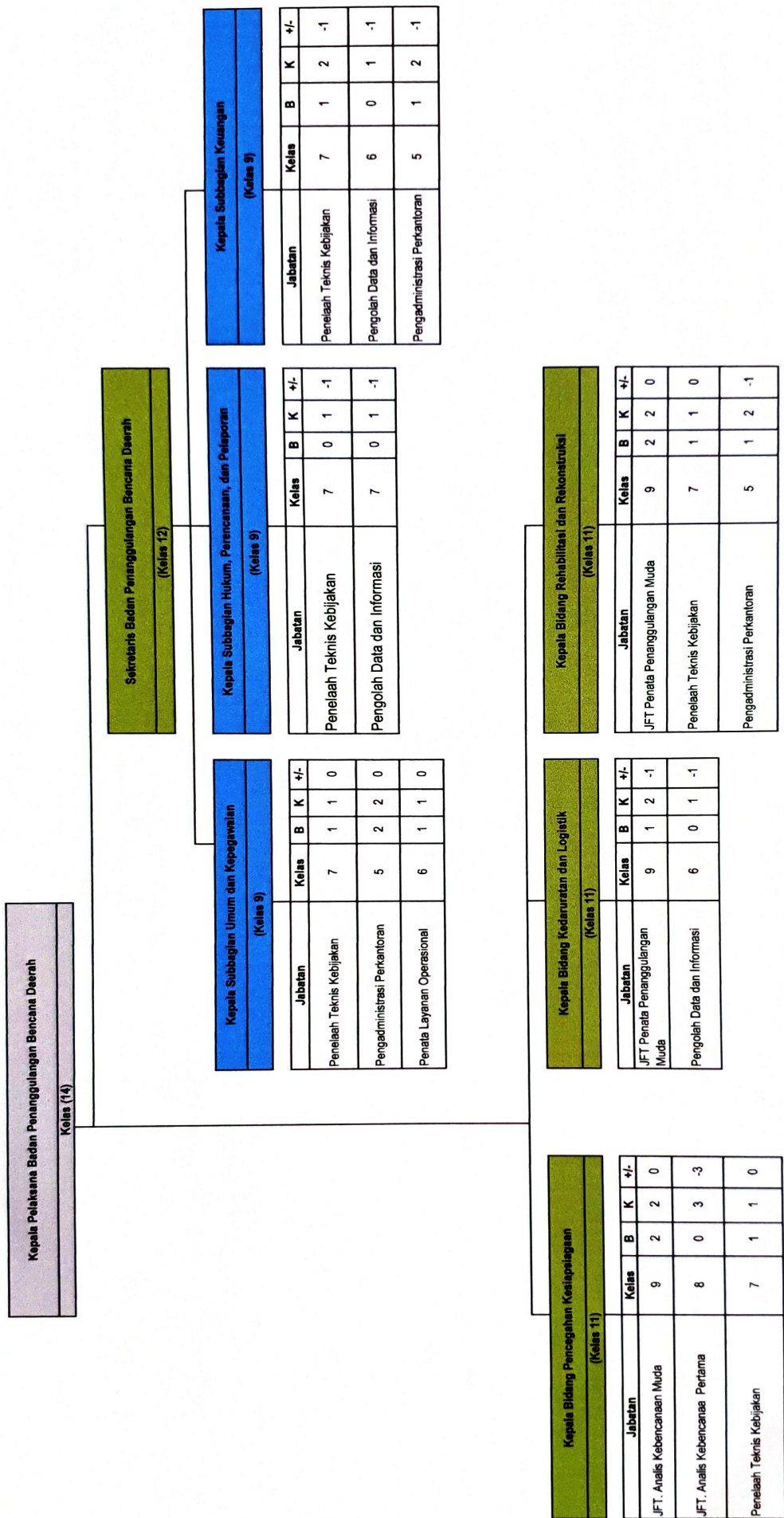
No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	3 Orang
4	Fungsional Tertentu	2 Orang
5	Fungsional Pelaksana	7 Orang
Jumlah		17 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2023.



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 1 orang yang menduduki jabatan eselon II sebagai Kepala Pelaksana BPBD, dan terdapat 4 orang yang menduduki jabatan eselon III sebagai Sekretaris dan Kepala Bidang, dan terdapat 3 orang yang menduduki jabatan eselon IV sebagai Kasubag, dan 2 orang dengan jabatan Fungsional Tertentu dan 7 Orang dengan jabatan Fungsional Pelaksana dengan total ASN sebanyak 17 orang pada lingkup BPBD Selayar.

PETA JABATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	Badan Penanggulangan bencana daerah						
		1. Tersedianya sarana prasarana minimal					Tidak adanya kegiatan ini dikarenakan tidak adanya anggaran untuk kegiatan ini
		2. Persentase penyelesaian dokumen kajian resiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- X 100% Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	$\frac{1}{1}$	100%	Dokumentasi	
		3. persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana $\frac{141.347}{141.347} \times 100\%$ seluruh penduduk dikawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{141.347}{141.347}$	100%	Dokumentasi	gelombang ekstrim dan abrasi pantai
		4. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal					Tidak adanya kegiatan ini dikarenakan tidak adanya anggaran untuk kegiatan ini
		5. Persentase penyelesaian dokumen renkon sampai dinyatakan sah/legal					Tidak adanya kegiatan ini dikarenakan tidak adanya anggaran untuk kegiatan ini
		6. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan					Tidak adanya kegiatan ini dikarenakan tidak adanya anggaran untuk kegiatan ini
		7. Persentase warga negara yang ikut pelatihan					Tidak adanya kegiatan ini dikarenakan tidak adanya anggaran untuk kegiatan ini
		8. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops $\frac{314}{314} \times 100\%$ Seluruh penduduk dikawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman	$\frac{314}{314}$	100%	Dokumentasi	

	9.	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan $\frac{14.843}{14.843} \times 100\%$ jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana (sesuai jenis ancaman)	$\frac{14.843}{14.843}$	100%	Dokumentasi	
	10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB					tidak ada KLB pada Tahun 2023
	11	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana $\frac{2}{2} \times 100\%$ jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	$\frac{2}{2}$	100%	Dokumentasi	
	12	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana $\frac{296}{296} \times 100\%$ Seluruh penduduk dikawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman	$\frac{296}{296}$	100%	SK TRC penanganan darurat bencana	
	13	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi $\frac{97}{200} \times 100\%$ Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana sesuai jenis ancaman	$\frac{97}{200}$	48,50%	Dokumentasi	

INDIKATOR KINERJA KUNCI KASIL (OUTCOME)
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

no	urusan pemerintah	indikator kinerja hasil	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	keterangan
1. PENANGGULANGAN BENCANA							
Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
		1. jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ----- X 100% Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	$\frac{141.347}{141.347} \times 100$	100	Dokumentasi	
		2. jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ----- X 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	$\frac{14.843}{14.843} \times 100$	100	Dokumentasi	
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ----- X100% Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	$\frac{314}{314} \times 100$	100	Dokumentasi	

Capaian Kinerja Badan Peanggulungan Bencana Daerah tahun 2023 terdiri dari 2 Program 12 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	3.950.000,-	3.949.000,-	0
Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	
Outcome	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	99,97 %	

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	2.936.000,-	2.936.000,-	0
Output	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	2.936.000,-	2.936.000,-	0
Output	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	2.936.000,-	2.936.000,-	0
Output	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	

5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	2.936.000,-	2.936.000,-	0
Output	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	3.750.000,-	3.750.000,-	0
Output	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100%	100 %	

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	3.388.000,-	3.388.000,-	0
Output	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	
Outcome	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100%	100%	

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	1.715.251.000,-	1.672.026.457,-	0
Output	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	
Outcome	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	100%	97,48 %	

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	11.342.000,-	11.342.000,-	0
Output	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	100%	100%	-

3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	4.308.000,-	4.308.000,-	0
Output	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	1 Dokumen	1 Dokumen	

	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			
Outcome	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	100%	100%	

C. Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	8.050.000,-	8.018.000,-	0
Output	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	
Outcome	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersedia	100%	99,60%	

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	66.053.000,-	66.053.000,-	0
Output	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 Orang	5 Orang	
Outcome	Persentase Peningkatan Kompetensi Tekhnis Pegawai	100%	100 %	

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	8.240.000,-	8.239.000,-	0
Output	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	
Outcome	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dapat dipenuhi	100 %	99,99 %	

2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	12.500.000,-	12.474.000,-	0
Output	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	1 Paket	1 Paket	
Outcome	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dapat dipenuhi	100 %	99,79 %	

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	9.200.000,-	9.200.000,-	0
Output	Jumlah Penyediaan jasa layanan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	
Outcome	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dapat dipenuhi	100 %	100%	

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	401.290.000,-	401.208.000,-	0
Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dapat dipenuhi	100 %	99,98 %	

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**1. Pengadaan Mebel**

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	13.000.000,-	13.000.000,-	0
Output	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	
Outcome	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	100 %	

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	64.656.000,-	64.172.000,-	0
Output	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	8 Unit	
Outcome	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	99,25 %	

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan jasa Surat Menyurat				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.790.000,-	5.790.000,-	0
Output	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	100%	

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	133.252.000,-	131.427.778,-	0
Output	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	98,63 %	

3. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	168.554.000,-	168.548.000,-	0
Output	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	100%	

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	38.630.000,-	38.630.000,-	0
Output	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	100%	

2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	137.120.000,-	136.464.000,-	0
Output	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	20 Unit	20 Unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	99,52%	

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	23.690.000,-	23.670.000,-	0
Output	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 Unit	14 Unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	99,52%	

4. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	73.530.000,-	73.530.000,-	0
Output	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1 Unit	1 Unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	100 %	

2. Program Penanggulangan Bencana

A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota

1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis kegiatan)				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	90.200.000,-	90.200.000,-	0
Output	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada dikawasan tempat tinggalnya	65 Orang	65 Orang	
Outcome	Persentase Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100%	

2. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	350.690.000,-	350.666.800,-	0
Output	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	99,99 %	

B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana**1. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	133.270.100,-	133.270.000,-	0
Output	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	145 Unit	145 Unit	
Outcome	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100%	100%	

2. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/kota

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	155.320.000,-	155.308.000,-	0
Output	Jumlah Kegiatan Penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) kabupaten/kota yang tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100%	99,99 %	

3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	47.800.000,-	47.775.000,-	0
Output	Jumlah Kawasan yang di tingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3 Kawasan	3 Kawasan	
Outcome	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100%	99,95 %	

4. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	87.102.000,-	87.018.600,-	0
Output	Jumlah personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknik dan Manajerialnya	10 Orang	5 Orang	
Outcome	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100%	99,98%	

C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1. Respon cepat penanganan darurat bencana kabupaten/kota

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	302.100.100,-	301.884.935,-	0
Output	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	99,93%	

2. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	54.188.000,-	54.158.000,-	0
Output	Jumlah Korban yang berhasil di temukan, di tolong dan di evakuasi per jenis kejadian Bencana	30 Orang	30 Orang	
Outcome	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	99,94%	

3. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	20.584.000,-	20.562.000,-	0
Output	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	35 Orang	35 Orang	
Outcome	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	99,89%	

4. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	470.000,-	470.000,-	0
Output	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	99,89%	

D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan**

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	470.000,-	470.000,-	0
Output	Jumlah data dan Informasi kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100%	100%	

2. Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	653.160.500,-	647.866.548,-	0
Output	Jumlah Penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) provinsi yang dilegalkan	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100 %	99,18 %	

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU

BAB IV PENUTUP

Sebagai lembaga yang baru berdiri selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, eksistensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengemban tugas sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana disadari belum memberikan arti yang signifikan, dibanding dengan beban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi, mengurangi, dan melaksanakan penanggulangan bencana daerah.

Hal ini antara lain karena keterbatasan anggaran dalam membiayai berbagai permasalahan mulai prabencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana, dan faktor SDM yang ada, baik pada tingkat kelembagaan daerah maupun masyarakat.

Selain itu, urusan penanganan bencana sebelum terbentuknya BPBD di masa lalu, sepenuhnya ditangani dan atau dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, sehingga pemerintah daerah terutama institusi yang ada belum cukup berpengalaman dalam memahami dan mengejawantahkan secara optimal pelaksanaan urusan di Bidang Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu, penanggulangan bencana pada tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, seyogyanya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah semata, namun juga dituntut adanya kesadaran dan peran serta dari segenap stakeholders yang ada dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja di bidang penanggulangan bencana. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Benteng, 19 Februari 2024

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**



Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

NIP. 19700726 199101 1 002